

Peran Dinas Kesehatan dalam Menurunkan *Stunting* di Kelurahan Singosari Kabupaten Gresik

Bagus Setyawan Nugraha, Lukman Arif

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
bagussetyawan930@gmail.com, lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Stunting is a persistent nutritional problem resulting from a long-term lack of nutritional intake, usually caused by unequal distribution of food and not meeting nutritional needs. Intrauterine growth restriction can manifest as stunting and become apparent when the child reaches two years of age. Stunting can affect individuals from early development to adulthood. Delays in the growth and development of toddlers due to stunting can have far-reaching impacts, including impaired cognitive capacity, increased risk of non-communicable diseases, decreased productivity, poverty, and increased chances of giving birth to babies with low birth weight. The aim of this research is to determine the role of the Health Service in reducing stunting. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques in this research are interviews, observation and documentation. Based on the research results that: 1. The role of the government as a regulator, regarding the problem of handling stunting toddlers, the rules made by the decision maker, namely the Regent, regarding stunting issues are quite good with these regulations, as well as the efforts made in handling stunting toddlers have been well monitored. , by providing coaching for 3 months and also providing additional food. 2. The government's role as a dynamist, treating stunted toddlers by conducting outreach and empowerment to handle and prevent the return of stunted toddlers. By conducting outreach either from social media or directly to the public, one of which is by posting on the media platform, namely Instagram. 3. The government's role as a facilitator, providing facilities and infrastructure as well as programs carried out in dealing with stunting toddlers, such as procuring body weighing equipment, height measuring instruments that are good and have accurate results.

Keywords: Role, Stunting

ABSTRAK

Stunting adalah masalah gizi yang menetap akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang, biasanya disebabkan oleh distribusi makanan yang tidak merata dan tidak memenuhi kebutuhan gizi. Keterbatasan pertumbuhan intrauterin dapat bermanifestasi sebagai *stunting* dan menjadi nyata ketika anak mencapai usia dua tahun. *Stunting* dapat mempengaruhi individu mulai dari perkembangan awal hingga kedewasaan. Keterlambatan tumbuh kembang balita akibat *stunting* dapat menimbulkan dampak yang luas, antara lain gangguan kapasitas kognitif, peningkatan risiko penyakit tidak menular, penurunan produktivitas, kemiskinan, dan peningkatan kemungkinan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam menurunkan *stunting*. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1. Peran pemerintah sebagai regulator, mengenai permasalahan penanganan balita *stunting* aturan-aturan yang dibuat oleh pengambil keputusan yaitu Bupati dalam masalah *stunting* sudah cukup baik dengan peraturan tersebut, begitu juga dengan upaya yang dilakukan dalam penanganan balita *stunting* sudah terpantau baik, dengan melakukan pembinaan selama 3 bulan juga memberikan tambahan makanan. 2. Peran pemerintah sebagai dinamisator, penanganan balita *stunting* dengan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan guna penanganan dan mencegah kembali adanya balita *stunting*. Dengan melakukan sosialisasi baik dari media sosial atau pun langsung kepada masyarakat salah satunya seperti dengan postingan di media platform yaitu Instagram. 3. Peran pemerintah sebagai fasilitator, memberikan sarana dan prasarana serta program-program yang dilakukan dalam penanganan balita *stunting* seperti pengadaan alat timbangan badan, alat ukur tinggi yang sudah baik dan tepat hasilnya.

Kata kunci: Peran, *Stunting*

PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini memprioritaskan masalah gizi, dengan penekanan khusus pada pencegahan *stunting*. Di Indonesia, *stunting* mengacu pada suatu kondisi yang disebut *dwarfisme*, yaitu terhambatnya pertumbuhan fisik dan kognitif pada balita, sehingga mengakibatkan ciri-ciri tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. *Stunting* adalah masalah gizi yang menetap akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang, biasanya disebabkan oleh distribusi makanan yang tidak merata dan tidak memenuhi kebutuhan gizi.

Keterlambatan tumbuh kembang balita akibat *stunting* dapat menimbulkan dampak yang luas, antara lain gangguan kapasitas kognitif, peningkatan risiko penyakit tidak menular, penurunan produktivitas, kemiskinan, dan peningkatan kemungkinan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. *Stunting* dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mempengaruhi generasi mendatang. *Stunting* dapat berdampak langsung pada anak, antara lain terhambatnya tumbuh kembang, berkurangnya kemampuan kognitif, dan terganggunya proses metabolisme. Selain dampak langsung, *stunting* juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang, termasuk berkurangnya kapasitas kognitif dan kinerja akademis, serta melemahnya antibodi, sehingga membuat individu lebih rentan terhadap penyakit.

Kelurahan Singosari sebagai salah satu Kelurahan di Kabupaten Gresik tidak lepas dari permasalahan *stunting* pada balita. Kondisi ini bukanlah tugas mudah bagi pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kejadian *stunting* erat kaitannya dengan status gizi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan peran pemerintah untuk menurunkan kejadian *stunting* pada balita melalui program-program yang relevan dengan kondisi masyarakat. Rendahnya status gizi masyarakat Kelurahan Singosari dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi masyarakat yang termasuk dalam kategori masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran **Dinas Kesehatan dalam menurunkan di Kelurahan Singosari Kabupaten Gresik.**

TINJAUAN LITERATUR

1. Peran Pemerintah

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Istilah "aktor" mengacu pada seseorang yang tampil dalam film. Dalam konteks permainan makyong, “aktor” adalah pelawak. Selain itu, "aktor" juga dapat menggambarkan serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Menurut Abu Ahmadi (1982) dalam (Diana et al., 2017) Peran adalah seperangkat ekspektasi masyarakat yang memiliki banyak aspek yang menentukan bagaimana individu harus berperilaku dan bertingkah laku dalam keadaan tertentu, ditentukan oleh posisi dan peran sosialnya. Adapun Peran pemerintah menurut teori Ryaas Rasyid dalam (Salsabila et al., 2020) antara lain :

- a. Peran pemerintah sebagai regulator
- b. Peran pemerintah sebagai dinamisator
- c. Peran pemerintah sebagai fasilitator

2. *Stunting*

Menurut Kemenkes (Kemenkes RI, 2022) *Stunting* merupakan akibat dari kekurangan gizi yang berkepanjangan sehingga menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan pada anak sehingga mengakibatkan tinggi badan lebih rendah dibandingkan teman sebaya pada usia yang sama.

Sedangkan menurut (WHO, 2014) *Stunting* pada masa kanak-kanak merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan manusia, dan berdampak pada hampir 162 juta anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia.

Stunting umumnya dipandang sebagai kelainan bawaan (genetik), sehingga menyebabkan pengabaian terhadap penyebab dan pencegahannya. Meski faktor keturunan sedikit berpengaruh dalam menyebabkan *stunting*. Faktor utama yang memberikan dampak paling signifikan adalah perilaku, lingkungan, dan layanan kesehatan.

3. Dampak *Stunting*

Stunting merupakan salah satu jenis gangguan pertumbuhan pada tubuh. Jika hal ini terjadi, otak merupakan salah satu organ tubuh yang langsung terancam punah. Otak mengandung neuron yang terlibat secara rumit dalam persepsi sensorik dan proses kognitif anak-anak selama pengalaman belajar. (Picauly & Toy, 2013)

Sedangkan menurut (Kemenkes RI, 2023), *Stunting* dapat menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang beragam terhadap kesehatan, tumbuh kembang anak, serta bangsa dan negara. Konsekuensi jangka pendek dari *stunting* meliputi gangguan pertumbuhan, terhambatnya perkembangan kognitif dan motorik, rendahnya kualitas fisik, dan masalah metabolisme. Sementara itu, dalam jangka waktu yang lama, *stunting* menyebabkan penurunan kemampuan kognitif. Gangguan neurologis dan otak yang berkepanjangan dan mengakibatkan berkurangnya kapasitas memperoleh pengetahuan selama masa sekolah, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas orang dewasa. Selain itu, gizi buruk dapat

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan stroke.

4. Pencegahan *Stunting*

Penyakit *stunting* dapat dicegah dengan menggunakan tiga strategi pencegahan *stunting*, yaitu sebagai berikut:

1) Pola makan

Memastikan asupan makanan yang cukup dan menyeluruh merupakan elemen penting dalam pencegahan gangguan pertumbuhan pada anak. Penting untuk memperkenalkan dan memasukkan makanan yang memberikan gizi seimbang ke dalam kehidupan kita sehari-hari sejak usia muda.

2) Pola asuh

Memahami dan memenuhi kebutuhan nutrisi bayi merupakan aspek krusial dalam mengasuh anak. Penting untuk siap memberikan ASI hingga bayi mencapai usia 6 bulan. Selain itu, disarankan untuk rutin mengunjungi posyandu untuk memantau tumbuh kembang bayi.

3) Sanitasi dan akses air bersih

Kurangnya ketersediaan fasilitas sanitasi dan air yang tidak terkontaminasi menjadi katalisator kerentanan anak terhadap penyakit menular. Untuk memastikan kebersihan yang baik, penting untuk menanamkan pada anak-anak kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta mencegah mereka buang air besar di tempat terbuka sejak usia dini.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada kerangka berpikir yang telah dibuat sebelumnya, dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu mengacu pada teori Ryaas Rasyid tentang peran pemerintah. Lebih jelasnya, fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Dinamizer ini berfungsi sebagai katalis pelibatan masyarakat dalam menghadapi tantangan. Pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dengan menawarkan kepemimpinan dan arahan yang komprehensif dan efisien kepada masyarakat. Bentuk bantuan tersebut salah satunya ditujukan kepada ibu hamil dan anak balita yang terkena dampak *stunting*.

2. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator ini merupakan peran yang sangat dibutuhkan. Dikarenakan semua rangkaian kegiatan dalam menurunkan *stunting* perlu adanya pendanaan atau pemberian modal kepada masyarakat yang terkena kasus *stunting*.

3. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran regulator adalah merumuskan peraturan yang secara efektif dapat mengatasi permasalahan penurunan angka *stunting*. Sebagai badan pengatur, pemerintah memberikan pedoman mendasar kepada masyarakat sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan program penurunan *stunting*.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana tempat yang akan diteliti dapat mendapatkan keterangan yang sesuai memiliki keterkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam menjalankan penelitian. Saat memilih situs, penting untuk mengevaluasi kekhasan dan kesesuaian topik yang dipilih. Kualitas kawasan memudahkan peneliti dalam mengungkap temuan baru. Peneliti memilih tempat penelitian di Desa Singosari Kabupaten Gresik berdasarkan kesesuaian masalah.

Analisis Data

Analisis data sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk secara efektif mengatur dan mengevaluasi beragam data yang dikumpulkan di lapangan, sehingga memfasilitasi penyajian temuan. Teknik analisis data melibatkan proses mengubah data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola dan dipahami, memfasilitasi pemahaman dan penggunaan praktisnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman dalam buku (Suwendra, 2018) Kegiatan analisis data dapat dilakukan secara terus-menerus hingga data mencapai ambang batas saturasi, seperti dijelaskan di bawah ini. Tahapan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman meliputi:

1. Pengumpulan Data

Hal ini dicapai melalui proses yang cermat dalam melakukan wawancara, melakukan observasi, mendokumentasikan catatan, dan menggunakan metodologi ilmiah. Alat pengumpulan data harus mematuhi banyak kriteria seperti validitas, ketergantungan, dapat dipercaya, dan objektivitas.

2. Pengurangan Data

Adalah sebuah upaya yang memfokuskan pada hal - hal penting, merangkum dan memilih hal-hal pokok dan membuang data yang tidak digunakan dalam penelitian.

3. Penyajian Data

Sebuah upaya untuk menampilkan data yang mudah dipahami dan dicemari dalam bentuk berupa grafik, tabel, bagan (*chart*) uraian naratif, jaringan kerja (*network*), matriks dan sebagainya.

4. Kesimpulan Data

Upaya untuk memahami signifikansi, konsistensi pola kejernihan, dan perkembangan logis sebab dan akibat. Kesimpulannya segera dikonfirmasi dengan memeriksa dan mengevaluasi kembali catatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merupakan uraian data mengenai peran dinas kesehatan dalam menurunkan *stunting* di Kelurahan Singosari Kabupaten Gresik yang merupakan suatu penjabaran dari hasil penemuan pada lokasi penelitian berdasarkan pengamatan penulis yang berkaitan dengan fenomena sesuai dengan fokus penelitian. Terdiri dari 3 variabel yang mengacu pada fokus penelitian menurut Ryaas Rasyid untuk mendalami Peran Dinas Kesehatan Dalam Menurunkan *Stunting* di Kelurahan Singosari Kabupaten Gresik. Tiga dimensi yang dikemukakan Ryaas Rasyid antara lain:

- a. Peran pemerintah sebagai regulator
- b. Peran pemerintah sebagai dinamisator
- c. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Untuk lebih jelasnya dari ketiga variabel tersebut akan di paparkan lebih jauh dibawah ini:

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

a. Aturan – aturan dalam penanganan menurunkan *stunting*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan ibu Nisak sebagai Kepala Bidang Gizi pada tanggal 16 Juli 2024 mengenai aturan tentang penanganan balita *Stunting*, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

“mengenai aturan-aturan hukum tentang penanganan Stunting sudah ada dijelaskan di Peraturan Bupati tentang Penurunan Stunting”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Kepala Bidang Gizi tidak menyebutkan aturan - aturan mengenai penanganan balita *Stunting*. Namun aturan-aturan terkait penanganan *Stunting* ada aturan yang dimuat dalam Peraturan Bupati Gresik No 9 Tahun 2023 tentang Pencegahan *Stunting*

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yaitu dengan ibu Endang selaku Kader Posyandu Mawar pada tanggal 15 Juli 2024 mengenai aturan tentang pencegahan *stunting* atau penanganan *stunting*. Hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“Untuk aturan – aturan hukum mengenai penurunan stunting seharusnya ada tapi saya cuman tahu sedikit saja namun untuk aturan nomor berapa saya lupa – lupa ingat kalau itu. “

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa kader posyandu hanya menyebutkan peraturan sudah ada namun tidak mengetahui sepenuhnya bahwa ada peraturan yaitu Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang pencegahan *stunting*.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan kader posyandu Bougenville yaitu Ibu Ema pada tanggal 15 Juli 2024 mengenai aturan yang berlaku tentang pencegahan *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Aturan tentang pencegahan stunting sebenarnya saya tidak tahu.”

Dilihat dari hasil wawancara tersebut kader dari posyandu Bougenville sepertinya tidak mengetahui adanya aturan yang terkait dengan pencegahan *stunting*. Yang mana aturan tersebut menjadi acuan dalam penanganan *stunting*.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa Peran Dinas kesehatan dalam percepatan penurunan *stunting* ditunjukkan dengan keberadaan regulasi terkait pencegahan *stunting*, yaitu Peraturan Bupati (Perbup) atau Surat Keputusan. Pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Gresik sudah dilakukan dengan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan dalam regulasi dengan sasaran Kelurahan Singosari sebagai lokus *stunting*. Tetapi masih ada dari beberapa kader posyandu balita *stunting* yang tidak mengetahui sama sekali tentang peraturan tersebut.

b. Upaya dalam penanganan menurunkan *stunting*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Penanggung Jawab Bidang Gizi yaitu Ibu Nisak pada Tanggal 16 Juli 2024 mengenai upaya dalam penanganan balita *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Balita *stunting* kami berikan PTM berupa biscuit dan kami pantau tumbuh kembangnya selama 3 bulan kedepan, kadang kami lakukan sweeping ke rumah-rumah balita.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa peranan Dinas Kesehatan dalam penanganan balita *stunting* dengan cara memberikan Pemenuhan Makanan Tambahan kepada balita *stunting* dan dilakukan pemantauan tumbuh kembang selama tiga bulan ke depan ditambah dengan melakukan *sweeping* ke rumah balita-balita yang terpantau memiliki masalah baik dalam berat badan maupun tinggi badan dan masalah penyakit lainnya.

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yaitu dengan ibu Endang selaku Kader Posyandu Mawar pada tanggal 15 Juli 2024 mengenai upaya yang dilakukan dalam penanganan menurunkan *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“kami dari pihak posyandu memberikan makanan tambahan (PMT) berupa makanan yang sehat dengan bahan ikan setiap harinya ke balita *stunting*, untuk mempercepat penanganan balita *stunting* dan juga seminggu sekali akan melakukan pemantauan terhadap balita yang terkena *stunting*. “*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa peran posyandu yang diwakili kader posyandu dalam penanganan balita *stunting* dengan cara memberikan makanan yang sehat dengan bahan ikan guna percepatan pemulihan balita *stunting* dan juga pemantauan seminggu sekali.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bu Ema selaku kader posyandu Bougenville mengenai upaya yang dilakukan dalam penanganan penurunan *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“Kami dari pihak posyandu memberikan makanan tambahan berupa makanan yang mengandung protein setiap harinya ke balita *stunting* dan juga memberikan Vitamin A agar mempercepat penanganan balita *stunting*.“*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa para kader memberikan makanan tambahan yang mengandung protein setiap harinya dan juga memberikan vitamin A kepada balita *stunting*.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dalam indikator Pemerintah Sebagai Regulator mengenai permasalahan penanganan balita *stunting* aturan-aturan yang dibuat oleh pengambil keputusan yaitu Bupati dalam masalah *stunting* sudah cukup baik dengan peraturan tersebut bisa menjadi langkah multi fungsi yaitu sebagai penanganan dan juga sebagai langkah dalam pencegahan adanya balita *stunting* lagi. Tetapi sangat disayangkan masih ada Kader Posyandu yang tidak tahu sama sekali tentang peraturan tersebut yaitu Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 yang mana peraturan tersebut menjadi acuan dalam penanganan balita *stunting*. Begitu juga dengan upaya yang dilakukan dalam penanganan balita *stunting* sudah terpantau baik, dengan melakukan pembinaan selama 3 bulan juga memberikan tambahan makanan dan diadakan langsung *sweeping* ke rumah balita sebagai langkah pencegahan penyakit pada balita.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

c. Sosialisasi

Berdasarkan wawancara peneliti dengan penanggung jawab bidang gizi puskesmas yaitu Ibu Nisak pada Tanggal 16 Juli 2024 mengenai sosialisasi yang dilakukan puskesmas dalam penanganan balita *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Proses sosialisasi ini sangat penting guna mengurangi balita stunting kami menunjuk salah satu kader posyandu sebagai kader stunting, gunanya selain untuk mensosialisasikan juga membantu dalam penanganan balita stunting sudah cukup baik.”

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan puskesmas dalam penanganan balita *stunting* melalui kader *stunting* sudah cukup baik dalam sosialisasi *stunting*, terbukti sekarang masyarakat sudah mengerti bahaya dari *stunting*, sehingga mereka tidak acuh terhadap hidup sehat dan pemenuhan vitamin-vitamin baik pada ibu hamil maupun balita.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yaitu dengan ibu Endang selaku Kader Posyandu Mawar pada tanggal 15 Juli 2024 mengenai sosialisasi yang dilakukan dinas kesehatan dalam pencegahan *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Sosialisasinya sekarang sangat gencar dilakukan. Dengan adanya sosmed maka untuk sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus agar masyarakat tahu betapa pentingnya masalah balita yang terkena stunting.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi dengan Puskesmas juga Kader Posyandu, juga menggunakan media sosial dalam mensosialisasikan *stunting*, dengan melakukan loka karya mini setiap tahun agar kinerja dari puskesmas maupun dinas kesehatan lebih baik lagi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bu Ema selaku kader posyandu Bougenville mengenai sosialisasi yang dilakukan dalam penanganan *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“ Kami sosialisasi terkadang melalui grup Whatsaap yang isinya para ibu – ibu. Nah dari situ para kader melakukan pemantauan dan juga pemberian pembekalan terhadap balita stunting.

Dilihat dari wawancara tersebut pihak kader posyandu Bougenville melakukan sosialisasi dari grup Whatsapp yang berisikan para ibu – ibu. Dan grup tersebut digunakan sebagai platform untuk mensosialisasikan penanganan *stunting*.

b. Pemberdayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penanggung Jawab Bidang Gizi yaitu ibu Nisak pada tanggal 16 Juli 2024 mengenai pemberdayaan yang dilakukan dalam penanganan balita *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan kami memberikan pembekalan ke kader posyandu tentang stunting sehingga dapat disampaikan lagi pada saat posyandu. Pemberian bibit tanaman yang mudah ditanam, agar pangan setiap keluarga tercukupi”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa peran puskesmas dalam penanganan balita *stunting* dengan memberikan pembekalan ilmu tentang *stunting* sehingga kader posyandu diharapkan bisa menyampaikannya kembali pada saat posyandu, pemberdayaan dengan memberikan bibit tanaman sehingga pangan keluarga tercukupi tetapi tidak berjalan dengan baik dikarenakan rata-rata masyarakat tinggal di daerah

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yaitu dengan ibu Endang selaku Kader Posyandu Mawar pada tanggal 15 Juli 2024 mengenai pemberdayaan yang dilakukan dinas kesehatan dalam pencegahan *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“saya bersama kader-kader posyandu lainnya di kumpulkan untuk diberikan arahan dan pemahaman tentang stunting, setelah itu pada saat jadwal posyandu kami sampaikan kepada ibu-ibu yang datang ke posyandu. Dan Juga baru tadi pagi saya ikut sosialisasi tentang PMT untuk balita stunting. “

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa kader – kader posyandu diberikan sosialisasi tentang pemberian makanan tambahan lokal (PMT) agar dapat disosialisasikan kembali kepada masyarakat yang terkena *stunting* supaya balita tersebut mendapatkan makanan yang bergizi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bu Ema selaku Kader Posyandu Bougenville mengenai pemberdayaan yang dilakukan dalam penanganan *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“ Upayanya saya sebagai kader ya melakukan pemantauan langsung terhadap balita stunting.

Dijelaskan dari hasil wawancara kader dari posyandu Bougenville melakukan upaya dengan cara pemantauan setiap hari terhadap balita *stunting*. Kadang seminggu sekali melakukan *sweeping* ke rumah keluarga yang terkena *stunting*.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kesimpulan dari indikator Pemerintah Sebagai Dinamisator dalam penanganan balita *stunting* dengan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan guna penanganan dan mencegah kembali adanya balita *stunting*. Dengan melakukan sosialisasi baik dari media sosial atau pun langsung kepada masyarakat salah satunya seperti dengan postingan di media platform yaitu Instagram.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

a. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Nisak pada Tanggal 16 Juli 2024 sebagai Penanggung Jawab bidang Gizi Puskesmas mengenai sarana dan prasarana yang diadakan dalam penanganan balita *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“untuk posyandu kami sediakan alat ukur tinggi, berat badan, lila, lingkaran kepala dan juga poster-poster, yang semua alatnya sudah elektrik dan hasilnya pun sudah tepat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang diberikan Dinas dan puskesmas dalam penanganan balita *stunting* di posyandu sudah cukup baik dengan pemenuhan perlengkapan yang ditujukan untuk pengukuran balita ditambah dengan alat-alat yang sudah elektrik sehingga memudahkan kader dan hasil penimbangannya tepat.

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yaitu dengan ibu Endang selaku Kader Posyandu Mawar pada tanggal 15 Juli 2024 mengenai sarana dan prasarana dalam pencegahan *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“ Alhamdulillah baru – baru ini pemerintah memberikan sumbangan berupa timbangan yang cukup memadai. Dan juga untuk fasilitas sendiri dikatakan sudah cukup memadai untuk melakukan penanganan stunting.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bawah pihak pemerintah atau Dinas Kesehatan memberikan sumbangan berupa timbangan kepada setiap posyandu. Dan juga untuk fasilitas dalam penanganan *stunting* sudah dikatakan cukup baik dan memadai.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bu Ema selaku kader posyandu Bougenville mengenai sarana dan prasarana dalam pencegahan *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“ Sarana prasarana disini sudah cukup baik dan memadai.”

Dilihat dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa posyandu Bougenville sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai dan juga baik dalam penanganan *stunting*.

Dari observasi yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa dinas kesehatan dalam memberikan sarana dan prasarana dalam penanganan balita *stunting* dengan

cara memberikan alat-alat ukur tinggi badan, penimbangan berat badan, pengukur lingkaran kepala sehingga memudahkan bagi kader juga hasilnya sudah pasti tepat juga adanya poster-poster yang ditempel di dinding dengan begitu bagi ibu-ibu yang membacanya menambah pengetahuan dan penanganan yang dilakukan dinas kesehatan sudah cukup baik dengan banyaknya tanggapan positif dari masyarakat.

b. Program – program dalam penanganan *stunting*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Penanggung Jawab Bidang Gizi yaitu Ibu Nisak pada tanggal 16 Juli 2024 mengenai program-program yang dilakukan dalam penanganan balita *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“sudah banyak dan baik program yang dilakukan dinas kesehatan dan puskesmas, alhamdulillah ada yang menerima juga ada yang tidak menerima tak peduli, terbukti dengan di tahun ini angka *stunting* sudah mulai menurun.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa program-program yang dilakukan Dinas kesehatan maupun Puskesmas sudah baik, walaupun tidak semua masyarakat menerima dengan baik adanya program-program tersebut.

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yaitu dengan ibu Endang selaku Kader Posyandu Mawar pada tanggal 15 Juli 2024 mengenai program – program yang dilakukan dalam pencegahan *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“ Programnya sendiri kami melakukan pemantauan tiap hari terhadap balita *stunting* dan seminggu sekali dilakukan pengukuran atau penanganan terhadap balita *stunting*. Dan juga kami memberikan makanan tambahan lokal yang diolah lalu diberikan kepada ibu – ibu.*

Dapat dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa para kader posyandu melakukan pemantauan setidaknya seminggu sekali dan juga para kader memberikan pembekalan tentang makanan tambahan yang diolah sesuai dengan acuan bidang gizi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bu Ema yang menjabat Kader Posyandu Bougenville mengenai program yang dilakukan dalam penanganan *stunting*, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“ Pada Tahun 2023 memang masalah *stunting* disini masih cukup banyak, tapi dari kami melakukan pemberian makanan tambahan yang mengandung protein dan juga memberikan penyuluhan olahan makanan yang sehat kepada ibu – ibu agar dapat dikasihkan kepada balita yang terkena *stunting*. Dan alhamdulillah pada tahun berkurang sangat banyak untuk masalah *stunting*”*

Dilihat dari hasil wawancara dapat dikatakan berhasil dalam program upaya pemberian makanan tambahan yang mengandung protein dan juga para kader melakukan penyuluhan terhadap ibu – ibu mengenai cara olah makanan yang sehat dan bergizi.

Dari observasi yang peneliti lakukan di lapangan menemukan bahwa Dinas Kesehatan dalam memberikan sarana dan prasarana serta program-program yang dilakukan dalam penanganan balita *stunting* seperti pengadaan alat timbangan badan, alat ukur tinggi yang sudah baik dan tepat hasilnya.

Di dalam penelitian akan di bahas peran dinas kesehatan dalam menurunkan *stunting* di Kelurahan Singosari Kabupaten Gresik. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dijelaskan oleh Ryaas Rasyid, yakni: 1. Peran Pemerintah sebagai regulator, 2. Peran Pemerintah sebagai fasilitator, 3. Peran Pemerintah sebagai dinamisator, sebagai berikut:

1. Peran Dinas Kesehatan Sebagai Regulator

Peran Pemerintah Sebagai Regulator mengenai permasalahan penanganan balita *stunting* aturan-aturan yang dibuat oleh pengambil keputusan Bupati dalam masalah *stunting* sudah cukup baik dengan peraturan tersebut bisa menjadi langkah multi fungsi yaitu sebagai penanganan dan juga sebagai langkah dalam pencegahan adanya balita *stunting* lagi. Dalam pencegahan dan penanganan *stunting* maka diperlukannya pembentukan kebijakan pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota yang dimaksudkan untuk mengatasi kasus *stunting* yang kini tengah menjadi prioritas bersama. Untuk itu pemerintah telah membuat suatu kebijakan untuk pencegahan dan penanganan *stunting* yaitu salah satunya dengan pembentukan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang pencegahan *stunting*. Dengan adanya kebijakan tersebut bertujuan untuk sebagai panduan maupun arahan kepada seluruh pihak yang terkait dan juga masyarakat dalam menjalankan perannya. Tetapi sangat disayangkan masih ada Kader Posyandu yang tidak tahu sama sekali tentang peraturan tersebut. Oleh karena itu untuk saat ini pemerintah masih menggunakan Peraturan Bupati sebagai pedoman pemerintah dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan *Stunting*. Begitu juga dengan upaya yang dilakukan dalam penanganan balita *stunting* sudah terpantau baik, dengan melakukan pembinaan selama 3 bulan juga memberikan tambahan makanan dan diadakan langsung *sweeping* ke rumah balita sebagai langkah pencegahan penyakit pada balita.

2. Peran Dinas Kesehatan Sebagai Dinamisator

Dalam pencegahan dan penanganan *stunting* maka dibutuhkannya sosialisasi atau penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya pencegahan *stunting* sejak dini dimulai dari kehamilan pertama atau 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan bayi berusia dua tahun. Namun dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan, maka hal tersebut belum bisa dikatakan efektif dikarenakan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan *stunting* yang disampaikan oleh ahli gizi maupun *stakeholder* yang terkait kepada orang tua balita itu tergantung kepada pemahaman orang tua dan juga pemberian makanan bergizi pada saat di rumah. Dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik melakukan pemberdayaan guna menangani balita *stunting* dan menjadi langkah pencegahan dari *stunting*. Pemberdayaan Dinas beserta Puskesmas memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang pengetahuan makanan bergizi, selain itu memberikan Pemulihan Makanan Tambahan (PMT). Tetapi dalam proses pemberdayaan dinas menemui kendala yaitu banyaknya orang tua yang enggan datang ke posyandu untuk mengikuti

pembekalan makanan yang diberikan kepada anak, dimana rasa malu dan malas yang menyebabkan orang tua enggan datang ke posyandu yang ada di Kelurahan.

3. Peran Dinas Kesehatan Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penanganan *stunting* sangat penting untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan. Dengan menyediakan infrastruktur dan layanan kesehatan, mengembangkan program nutrisi, serta melakukan koordinasi antar-sektor, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penanganan *stunting*. Selain itu, penyediaan informasi, dukungan finansial, serta pemantauan dan evaluasi program memastikan bahwa intervensi yang dilakukan berdampak positif dan dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Dinas Kesehatan dalam memberikan sarana dan prasarana serta program-program yang dilakukan dalam penanganan balita *stunting* seperti pengadaan alat timbangan badan, alat ukur tinggi yang sudah baik dan tepat hasilnya. Dan juga program – program yang dilakukan pemerintah sudah dikatakan cukup baik dalam penanganan *stunting* seperti pemberian Makanan Tambahan Lokal (PMT). Pihak Dinas Kesehatan juga memberikan penyuluhan kepada pihak – pihak terkait mengenai PMT ini agar dapat diberikan sosialisasikan kepada ibu – ibu agar dapat menambah wawasan tentang penanganan *stunting*.

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menangani balita *stunting* dinas kesehatan berperan sebagai berikut: Dinas Kesehatan dalam rangka melaksanakan penanganan balita *stunting* pada anak balita berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dilingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati, maksud dan tujuan dibuat aturan tersebut dimaksud agar dinas beserta puskesmas dan desa mempunyai pedoman dalam pelaksanaan penanganan balita *stunting* ini agar tepat sasaran. Dalam hal sosialisasi dan pemberdayaan, Dinas Kesehatan memberikan bekal penyuluhan kepada kader maupun pegawai puskesmas guna mensosialisasikan di setiap desa- desa dilakukan lokakarya mini tentang *stunting*, dalam hal ini pemberdayaan Dinas beserta Puskesmas memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang pengetahuan makanan bergizi, selain itu memberikan Pemulihan Makanan Tambahan (PMT) dengan susu yang diberikan selama 3 bulan pengawasan kader posyandu secara intensif. Fasilitas yang diberikan untuk penanganan pencegahan *Stunting* pada balita seperti timbangan, alat ukur tinggi, serta memberikan buku saku untuk monitor perkembangan pada anak.

SARAN

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya inovasi-inovasi yang menarik sehingga para orang tua memahami arti posyandu dan memiliki keinginan untuk datang ke posyandu untuk dapat lebih baik lagi dalam memantau tumbuh kembang anak.

2. Adanya program pendidikan tentang *stunting* yang disampaikan langsung oleh dinas kesehatan.
3. Lebih meningkatkan pelatihan dan edukasi pada tenaga kesehatan sehingga menciptakan sumber daya manusia yang berguna dalam penanganan balita *stunting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, P., Suwena, I. K., & Wijaya, N. M. S. (2017). Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Di Desa Peliatan. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(2), 87–90.
- Kemenkes RI. (2022). *Mengenal 3 Tips Pencegahan Stunting*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/mengenal-3-tips-pencegahan-stunting>
- Kemenkes RI. (2023). *Mengenal Lebih Jauh tentang Stunting*. Kemenkes. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2657/mengenal-lebih-jauh-tentang-stunting
- Picauly, I., & Toy, S. M. (2013). Analisis Determinan Dan Pengaruh Stunting Terhadap Prestasi Belajar Anak Sekolah Di Kupang Dan Sumba Timur, Ntt. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 8(1), 55. <https://doi.org/10.25182/jgp.2013.8.1.55-62>
- Salsabila, J., Arifin, J., & Mardani, E. (2020). *Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua. 3*, 107–124.
- Suwendra, I. W. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan. In *NilaCakra Publishing House, Bandung*. yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- WHO. (2014). *Global nutrition targets 2025: stunting policy brief*. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.3>